

PERAN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI INDONESIA KE SOUTHERN PARTNERS

Zipora Mahalia^{1*}

¹Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta

*Email: ziporamahalia@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya kerangka kerja sama Internasional baru antara negara berkembang yang dikenal dengan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular merupakan usaha negara-negara berkembang memutuskan tali ketergantungan ekonomi pembangunan oleh negara maju. Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular sehingga kemudian dikenal menjadi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. Pelaksanaan KSST Indonesia sebagai salah satu kebijakan luar negeri Indonesia, menjadi hal yang penting dan efektif sebagai instrumen/alat untuk melakukan diplomasi Indonesia di dunia internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang atau *Southern Partners*. Implementasi dari kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan *Dyadic Power Theory* untuk menjelaskan peran KSST Indonesia sebagai instrumen yang digunakan Indonesia untuk berdiplomasi dengan *Southern Partners* demi mencapai kepentingan nasional negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSST Indonesia memiliki peran besar yang signifikan bagi hubungan Indonesia dengan *Southern Partners*. Berdasarkan *Dyadic Power Theory*, Indonesia memiliki posisi yang baik dan cukup mendominasi dalam hubungan kerja sama dengan *Southern Partners* terkait KSST Indonesia. Kedepannya Indonesia akan terus berkomitmen untuk semakin mengembangkan kinerjanya sebagai negara donor dan selalu bersifat adaptif dengan situasi yang berkembang di dunia internasional.

Kata Kunci: Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; kebijakan luar negeri Indonesia; diplomasi; kepentingan nasional; *Southern Partners*

THE ROLE OF INDONESIAN SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION AS A DIPLOMATIC INSTRUMENT INDONESIA TO SOUTHERN PARTNERS

ABSTRACT

The emergence of a new international cooperation framework between developing countries known as the Indonesia South-South and Triangular Cooperation is an attempt by developing countries to break the economic dependence on development by developed countries. South-South Cooperation (SSC) is a development cooperation between developing countries to achieve mutual independence based on solidarity, equality, and mutual benefit. In its journey, this cooperation model has evolved with the support of development partners known as Triangular Cooperation, as known as South-South and Triangular Cooperation. The implementation of Indonesia's SSTC as one of Indonesia's foreign policies is essential and useful as an instrument/tool for carrying out Indonesian diplomacy in the international world, especially for developing countries or Southern Partners. The implementation of this policy is directed to realizing Indonesia's national interests in the global world. This study uses a qualitative approach and descriptive method with Dyadic Power Theory to explain Indonesia's SSTC as an instrument used by Indonesia to diplomacy with Southern Partners to achieve the national interest of the country. The results of this study indicate that Indonesia's SSTC has a significant role in the relationship between Indonesia and Southern Partners. Based on Dyadic Power Theory, Indonesia has a good position and is quite dominant in the cooperation relationship with Southern Partners related to Indonesia's SSTC. In the future, Indonesia will continue to be committed to further developing its performance as a donor country. It will always be adaptive to the developing situation in the international world.

Keywords: South-South and Triangular Cooperation, Indonesia foreign policy, diplomacy, national interest, Southern Partners.

Korespondensi: Zipora Mahalia S.I.Kom. Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Perumahan Cipinang Indah I, Jalan Cipinang Indah 1, Blok D No. 77, Jakarta Timur 13430. **No. HP, WhatsApp: 081311019084** Email: ziporamahalia@gmail.com

PENDAHULUAN

Peran Indonesia dalam Kebijakan Kerja Sama Selatan-Selatan telah dimulai sejak diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini menjadi titik awal dari pergerakan politik pembangunan bersama negara dunia ketiga (*The Third World*) untuk melakukan kerja sama internasional. Saat itu, sejalan dengan usainya Perang Dunia II, muncul negara-negara yang baru merdeka di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan adanya negara-negara baru tersebut kemudian menimbulkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang saat itu, telah menjadi isu besar.

Maka, pasca Perang Dingin terbentuklah sebuah pola yang di sebut sebagai *North-South* atau kerangka Kerja Sama Utara-Selatan yang merupakan bentuk bantuan kerja sama dari negara inti atau *First world* yaitu negara-negara maju kepada negara periferi atau *Third world* yaitu negara-negara berkembang (negara-negara baru). Namun, pada akhirnya pola ini malah menimbulkan ketergantungan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Pola ini juga menimbulkan ketimpangan dimana, negara-negara berkembang selalu dianggap berada pada posisi minoritas (Abdurachman & Prakoso, 2017).

Selain itu kondisi ekonomi dunia mulai mengalami kejenuhan atau *aid fatigue* akibat bipolar system yang terjadi (US-Uni Soviet) terutama dalam hal bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang (Kemlu, 2015). Prioritas utama negara-negara maju bukan lagi perihal bantuan luar negeri sehingga akhirnya hal ini menimbulkan kelambatan bagi negara-negara maju atau lewat badan donor lainnya untuk menanggapi kesulitan negara berkembang (Pujayanti, 2015).

Maka agar dapat mengatasi permasalahan ketidakseimbangan ini, diawali dengan Konferensi Asia-Afrika (KAA), hasil dari konferensi tersebut menyepakati perlunya kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara-negara berkembang lewat penyediaan bantuan teknis, pertukaran para ahli untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, dan pertukaran keahlian teknologi (*exchanging technological know-how*) sehingga terbentuklah sebuah kerangka kerja sama internasional baru, yaitu Kerja Sama Selatan-Selatan atau KSS yang kemudian dalam praktiknya juga melibatkan pihak triangular atau pihak mitra pembangunan dari negara maju dan dikenal menjadi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular atau dalam dunia internasional juga dikenal sebagai *South-South Triangular Cooperation* (SSTC) (JICA, 2010).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden Indonesia ke-5, beliau membawa rumusan baru pada konsep politik luar negeri yaitu “navigating on turbulent ocean” (mendayung di samudera yang bergejolak). Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia semakin kompleks dan bukan lagi perihal blok komunis dan liberal.

Sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden SBY, kerja sama dengan negara-negara maju masih menjadi prioritas yang terdepan, namun kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang mendapat tempat yang

lebih baik dibandingkan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Falsafah Presiden SBY mengenai “*A million friends and zero enemy*” dalam diplomasi internasional menekankan bahwa Indonesia menghadapi lingkungan baru yang strategis, tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh dan begitu juga sebaliknya, tidak ada negara yang Indonesia anggap sebagai musuh.

Indonesia dapat mempunyai sebanyak mungkin teman dan tanpa memiliki satupun musuh, “*All directions foreign policy*”, sehingga Indonesia dapat bekerjasama dengan siapapun, dari negara manapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama: utamanya untuk membangun tatanan dunia yang damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Falsafah inilah yang sangat mendukung Indonesia menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan negara-negara Selatan dalam rangka pencapaian kepentingan nasional Indonesia. (JICA, 2010)

Kerangka teori penelitian ini diawali dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia sebagai instrumen diplomasi Indonesia (diplomasi publik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi bantuan luar negeri) ke Southern Partners, serta dengan menggunakan Dyadic Power Theory, dijelaskan bagaimana hubungan Indonesia dengan Southern Partners dan saling memberikan manfaat satu sama lain.

1. *Dyadic Power Theory*

Dyadic Power Theory pertama kali dikemukakan oleh Boyd Rollins dan Stephen Bahr pada tahun 1976 dan kemudian mengalami perubahan (revisi) oleh Norah E. Dunbar pada tahun 2004. *Dyadic Power Theory* menekankan bahwa dalam suatu hubungan, antar individu yang berhubungan memiliki power (kekuatan, kekuasaan, atau daya) yang relatif.

Dyadic Power Theory memunculkan pandangan adanya perbandingan kekuatan dominan yang membuat individu yang satu memiliki kuasa lebih untuk memutuskan sesuatu dibanding individu lainnya sehingga dapat lebih berkuasa mengontrol hubungan kedua individu tersebut. “*Greater control attempts lead to greater influence over decisions*” yang berarti individu yang dominan akan mengontrol lebih dan otomatis akan memberi pengaruh yang lebih besar kepada individu yang satunya, meskipun pada praktiknya akan terasa seimbang karena akan memberi kepuasan kelengkapan bagi yang mengontrol maupun yang dikontrol (Dunbar, 2004)

Dyadic Power Theory menganggap manusia adalah makhluk yang rasional, berorientasi tujuan yang berasal dari persepsi mengenai posisi mereka dalam suatu hubungan, dan menjadikan persepsi tersebut sebagai media untuk merencanakan serta menggunakan strategi-strategi tertentu untuk mempengaruhi orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Dyadic Power Theory* untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hubungan diplomasi dengan negara Southern Partners berkaitan dengan implementasi kebijakan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia yang berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah langkah-langkah bersifat sistematis yang digunakan untuk mendapatkan dan menyusun suatu pengetahuan ilmiah. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi, wawancara atau interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya yang bertujuan untuk menampilkan segala respons dan perilaku subjek penelitian (Setyosari, 2012; Agustinova 2015).

Metode deskriptif atau mendeskripsikan adalah metode yang digunakan dalam menemukan ciri-ciri, unsur, dan sifat dari suatu fenomena. Metode ini menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu (Suryana, 2010).

Jenis Data

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Kementerian/Lembaga anggota Tim Kornas yang menjalankan Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Selatan-Selatan, dan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan Selatan Triangular yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Data sekunder, yaitu berupa data, literatur dan dokumen-dokumen lainnya seperti artikel jurnal, laporan, dan lain-lain yang dapat mendukung dan memperkaya data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2009; Agustinova 2015). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan tiga metode, yaitu:

a. Observasi

Bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera, sehingga peneliti dapat memahami kondisi dan konteks data dalam keseluruhan baik secara holistik dan menyeluruh.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling tanya jawab sebagai pertukaran informasi dan ide berhubungan dengan topik tertentu (Sugiyono, 2009; Agustinova 2015)

c. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dokumen merupakan pendukung bagi data penelitian hasil observasi dan wawancara,

sehingga kelengkapan datanya akan menjadi lebih kredibel kelengkapan data yang lain baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang (Sugiyono, 2009; Agustinova 2015)

Teknik Analisis Data

Miles & Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga bagian dalam melakukan suatu analisis yang interaktif dan berkelanjutan yaitu Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification).

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas serta dengan waktu penelitian selama tahun 2019-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama Internasional antara Negara-negara Berkembang

Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan negara-negara sekitarnya terkhususnya dengan negara-negara berkembang. Diprakarsai sejak dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia bersama negara-negara berkembang lain bertekad untuk saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan negara yaitu urgensi terdahulu berkaitan dengan kejenuhan pola kerja sama utara-selatan yang mengharuskan negara-negara berkembang bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negaranya tanpa harus selalu ketergantungan dengan negara maju.

“...ada urgensi untuk saling bekerjasama, untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan pembangunan..., kerja sama pembangunan itu menjadi urgent...” (Jati, komunikasi pribadi, 5 Juni 2020)

Kerja sama antar negara berkembang merupakan bentuk solidaritas global saat itu. Pertemuan KAA kemudian menghasilkan Dasasila Bandung atau biasa dikenal dengan “The Ten Principles” yang merupakan prinsip-prinsip dasar berkaitan hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia.

Arah kebijakan kerja sama internasional dengan negara berkembang di Indonesia kemudian berkembang dan melahirkan apa yang disebut Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia lalu dalam perkembangannya ikut turut melibatkan pihak mitra pembangunan dari negara maju sehingga lebih dikenal menjadi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia. KSST ini tidak seperti kerja sama ‘biasa’ atau kerja sama tradisional yang sekedar merupakan hubungan bilateral maupun multilateral. Seperti penjelasan dari Danny Rahdiansyah selaku Kasubdit Organisasi Internasional pada Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri RI

“...karakteristik utama dari kerja sama dengan negara dalam KSST itu adalah sifatnya bantuan teknik dan capacity building..., bantuan teknik dan peningkatan kapasitas, bentuknya pelatihan, workshop, kayak gitu itu yang diarahkan untuk Kerja Sama Selatan-Selatan...” (Komunikasi pribadi, 2 Juni 2020).

Pelaksanaan KSST Indonesia merupakan kerja sama yang diarahkan sebagai penguatan dan perluasan pembangunan yang dilakukan dalam bentuk modalitas kerja sama teknik

“Ruang lingkungannya sendiri difokuskan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan seperti workshop, beasiswa, terus ada bantuan program, proyek, ada juga bentuk-bentuk kegiatan seperti beasiswa dan tenaga ahli.” (Jati, komunikasi pribadi, 5 Juni 2020)

Danny juga menegaskan kembali bahwa ada perbedaan dalam kerja sama dengan negara berkembang ‘biasa’ dengan konteks KSST Indonesia ada pada bentuk kerja sama dalam bentuk bantuan teknik dimana bantuan yang diberikan oleh Indonesia seumpama diplomasi yang dilakukan dengan tangan di atas (pihak yang memberi)

“Kerena kerja sama dengan negara berkembang lainnya, kita bisa masukin pertahanan, atau apa segala macam tapi bukan merupakan kerja sama tekniknya itu. sama bantuan tekniknya, ada elemen capacity buildingnya dan kita sebagai provider. Berarti penyedia, jadi tangan kita di atas Zipora..., diplomasi tangan di atas, bukan tangan di bawah.” (Rahdiansyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020).

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia

Indonesia telah lama aktif dalam melakukan kerja sama Internasional baik dalam ruang lingkup kerja sama bilateral, multilateral, maupun dalam sektor regional. Hal ini merupakan usaha Indonesia memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dengan adanya KSST, kepentingan-kepentingan nasional Indonesia sebagai sebuah negara seperti dalam sisi ekonomi terkait akses pasar dan ekspor, sisi sosial budaya, sisi politik maupun kepentingan strategis yang menyangkut kedaulatan negara pada isu-isu internasional dapat terwujud.

“...kepentingan kita banyak sebagai sebuah negara. Kepentingan kita dari sisi politik, sisi ekonomi, sisi social budaya, dan juga kepentingan strategis kita dalam menjaga kedaulatan. Itu garis besarnya, jadi KSS itu adalah alat diplomasi untuk mencapai tujuan.” (Rahdiansyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020)

Keberadaan KSST Indonesia menjadi instrumen atau alat Indonesia untuk berdiplomasi terutama ke negara-negara berkembang penerima bantuan yang selanjutnya disebut Southern Partners. Jati, staf pada bagian Direktorat Politik Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa dengan adanya KSST Indonesia maka beberapa persoalan-persoalan yang sulit diselesaikan jika dengan melibatkan tradisional cooperation atau kerja sama tradisional

“...KSST sendiri itu modalitas utama yang dipakai adalah knowledge sharing. Nah nilai unique dari KSST disini itu bahwa, ada persoalan-persoalan pembangunan yang tidak bisa...,maksudnya tidak sepenuhnya diselesaikan di adress melalui kerja sama yang bentuknya tradisional.” (Jati, komunikasi pribadi, 5 Juni 2020)

Lanjutnya, Jati menjelaskan bahwa jarak-jarak yang membatasi knowledge sharing negara maju ke negara berkembang seringkali sulit dijangkau terutama mengenai permasalahan pembangunan.

Seperti contoh, jika Myanmar langsung belajar ke Jerman, maka aka nada gap yang mungkin cukup jauh untuk Myanmar bisa beradaptasi untuk mencoba menerapkan apa yang Jerman lakukan. Hal inilah yang lebih dikenal sebagai development proximity. Myanmar sebagai negara berkembang akan jauh lebih mudah mengadopsi pembelajaran dari Indonesia

“Nah dengan modalitas knowledge sharing ini, kan negara-negara berkembang itu punya development proximity,...namun gap antara Indonesia dengan negara-negara yang kita bantu melalui KSST itu tidak jauh, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan itu lebih sesuai dengan modalitas KSST...”(Jati, komunikasi peneliti, 5 Juni 2020).

Meskipun Indonesia kini tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai negara berkembang karena posisinya yang sudah masuk middle income country, namun Indonesia tetap memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dengan negara-negara berkembang di sekitarnya.

Meskipun setiap negara pada dasarnya memiliki keunikan sendiri dan permasalahan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kemiripan-kemiripan tertentu dalam hal tantangan-tantangan pembangunan.

Menurut penjelasan Rahdiansyah, Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia sifatnya functional cooperation, kerja sama yang sifatnya teknis, dan low politics, terutama yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia lebih berhati-hati pada pelatihan-pelatihan yang sifatnya highly political sensitive, seperti hal-hal yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, atau terkait terorisme (Rahdiansyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020).

Kebijakan Politik Luar Negeri dan Kepentingan Nasional Indonesia

Secara umum dengan adanya pelaksanaan KSST Indonesia sebagai kebijakan politik luar negeri Indonesia, kepentingan-kepentingan nasional yang dapat terwujud adalah kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan diplomasi strategis (menyangkut isu-isu tertentu).

KSST Indonesia dapat menjadi media Indonesia untuk berhubungan baik dengan negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikan terutama kepada Southern Partners.

Kemudian akan berpengaruh pada perluasan kerja sama Indonesia di bidang-bidang lain. Selain itu secara tidak langsung Indonesia turut mempromosikan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pada dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian isu-isu di tingkat global. Hal-hal inilah yang menjadi kepentingan nasional Indonesia.

Holsti dan Chandra sama-sama membagi tujuan kebijakan luar negeri menjadi lima: (1) mempertahankan integritas bangsa; (2) mempromosikan kepentingan ekonomi; (3) menjamin keamanan nasional; (4) menjaga prestise dan mengembangkan kekuatan negara; dan (5) menjaga ketertiban dunia (JICA, 2010).

Dyadic Power Theory: Posisi Indonesia di Mata Southern Partners

Peneliti berusaha menjelaskan keterkaitan elemen-elemen dalam *Dyadic Power Theory* dalam penggunaannya pada konteks KSST Indonesia sebagai instrumen diplomasi Indonesia ke *Southern Partners*. *Partners* disini adalah pihak-pihak atau aktor yang saling berhubungan dan memiliki authority masing-masing dalam pelaksanaan KSST Indonesia yaitu, Indonesia sebagai negara *provider* atau pemberi bantuan, Southern Partners sebagai negara recipient atau negara penerima bantuan, dan Mitra Pembangunan yaitu lembaga donor sebagai support bagi Indonesia dalam kerangka triangular: *Partners + Authority*.

Kemudian, segala kegiatan dan program yang dijalankan oleh Indonesia dalam kerangka KSST Indonesia merupakan resources sebagai control attempts berupa usaha diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan diplomasi bantuan luar negeri yang menghasilkan control pada *Southern Partners: Resources* □ *Control Attempts (Control)*. Respon *Southern Partners* yang terlibat dalam KSST Indonesia pada akhirnya akan

menunjukkan power dan relative yang dimiliki Indonesia terhadap *Southern Partners* lewat diplomasi yang dilakukan dalam kerja sama tersebut: *Power + Relative* (Dunbar, 2004).

1) *Partners + Authority*

Elemen partners dan authority disini merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia dengan posisi dan perannya masing-masing. Authority berhubungan dengan kewenangan, posisi, status individu yang melakukan sebuah hubungan (Dunbar, 2004)

Pihak atau pemangku kepentingan utama adalah pemerintah Indonesia aktor negara utama yang berperan sebagai provider atau negara pemberi bantuan, yang terbagi menjadi beberapa aktor lain. Indonesia berposisi sebagai negara provider dapat memberikan bantuan ke Southern Partners dalam bidang teknis secara spesifik terkait bidang-bidang tertentu. “contohnya kita memberikan pelatihan mengenai perikanan ke negara-negara Pasifik..., atau kita memberikan pelatihan mengenai pemadam kebakaran ke anggota pemadam kebakaran Timor Leste, itu spesifik.” (Rahdiansyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020). Pihak yang kedua adalah aktor mitra pembangunan yg berada di luar aktor utama yang sifatnya support collaborative bagi Indonesia. Baik sebagai provide dana maupun provide expert.

2) *Resources Control Attempts (Control)*

Resources disini merupakan sumber daya yang diberikan, kaitannya disini adalah menyangkut keunggulan Indonesia dalam KSST Indonesia, hal apa yang bisa diberikan Indonesia dalam KSST Indonesia sehingga Southern Partners mau bekerja sama dengan Indonesia. Lampiran 15 merupakan beberapa keunggulan Indonesia dalam bidang-bidang tertentu.

Keunggulan Indonesia dalam KSST Indonesia itu sendiri berakar pada KSST *Indonesia's Flagships Programs* yang menjadi tiga cluster besar yang sampai sekarang digunakan dan berlaku dalam pelaksanaan KSST Indonesia. Dalam menentukan program dan proyek Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia saat ini masih berdasarkan pada Flagship Programs yang dimiliki Indonesia yang juga tertera pada RPJMN 2020-2024 yaitu: Isu pembangunan (Development Issues), Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance & Peace Building), dan isu ekonomi.

A. Diplomasi Publik

Diplomasi Publik berhubungan dengan citra positif yang ingin dibentuk oleh Indonesia terutama di mata Southern Partners. Tiga hal yang ingin ditekankan oleh Indonesia terkait posisinya melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, yaitu Indonesia merupakan partner yang credible, reliable, dan sustainable.

Credible diartikan bagaimana Indonesia memiliki kapasitas yang dapat dipercaya untuk memberikan bantuan luar negeri dalam bidang teknis ke negara Southern Partners selaku negara recipient.

“Jadi kalau misalnya kita diminta bantuan untuk pelatihan perikanan kita punya *expert*-nya, pelatihan UMKM, kita juga ada *expertenya*, *credible* dalam arti itu. Jadi bisa diandalkan.” (Rahdiansyah, komunikasi peneliti, 2 Juni 2020).

B. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi berbicara mengenai kegiatan ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, kerja sama dan perjanjian perdagangan, peluang akses pasar dan investasi, yang menjadi kepentingan nasional dalam usaha menumbuhkan perekonomian negara. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015 – 2019) sampai sekarang, sesuai dengan visi dan misinya, Presiden Jokowi lebih mengarah pada diplomasi dagang daripada diplomasi politik, sehingga salah satu program prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia sekarang adalah bagaimana memperkuat kinerja diplomasi ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini juga telah ditekankan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selaku pelaksana utama garda depan diplomasi, yang tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kemlu tahun 2015-2019, dimana penguatan diplomasi ekonomi menjadi salah satu dari 8 arah kebijakan yang disepakati (Sabaruddin, 2016).

C. Diplomasi Bantuan Luar Negeri

Diplomasi ini lebih dikenal dengan diplomasi tangan di atas, yang juga memproyeksikan bagaimana pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia dan Triangular berjalan. Indonesia mempunyai posisi sebagai negara pemberi bantuan atau provider, kemudian memberikan bantuan kepada Southern Partners yang merupakan negara recipient dan dibantu dengan kalaborasi support dari mitra pembangunan negara maju yang merupakan pihak triangular.

Indonesia ingin dipandang sebagai negara pemberi bantuan atau donor yang bukan seperti Negara Barat. Walaupun Indonesia kini berada pada posisi negara middle income country tetapi Indonesia tetap memosisikan dirinya secara politik dan ekonomi sebagai negara berkembang. Indonesia tetap menghormati Southern Partners sebagai negara-negara berdaulat dan tidak akan ada intervensi politik apapun.

“...walaupun tangan kita di atas, tapi bukan donor kayak IMF, kayak Negara Barat yang benar-benar memberikan persyaratan yang rinci dan detail, yang menekan negara penerimanya gitu...” (Rahdiansyah, komunikasi peneliti, 2 Juni 2020)

1) Power + Relative

Elemen power adalah bagian yang menjelaskan kemampuan atau potensi seseorang untuk mempengaruhi atau mengontrol perilaku dan sikap seseorang. Elemen relative adalah perbedaan power/kekuasaan antara individu-individu yang memiliki hubungan dimana satu dengan yang lain memiliki kekuatan yang relative, tidak sama). Sementara control attempts adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi dan merubah perilaku orang lain (power used) menghasilkan control. (Dunbar, 2004)

Peneliti disini menjelaskan elemen power dengan adanya elemen relatif dari adanya Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia akan memberikan control attempts untuk melakukan control kepada respon Southern Partners terhadap Indonesia terutama setelah adanya pelaksanaan program dalam kerangka tersebut.

Kehadiran KSST Indonesia berarti menjaga kedaulatan dan hubungan baik dengan Southern Partners agar sikap politiknya bisa bersahabat dengan Indonesia sehingga bisa men-look Indonesia. Parameter

keberhasilan dapat dilihat melalui feedback dan kuisisioner yang disebarakan setelah dilaksanakannya program atau pelatihan, jika hasilnya 90% positif maka dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan berhasil. Meski begitu belum ada ukuran pasti bersifat tangible yang bisa mengukur secara langsung keberhasilan KSST Indonesia secara kuantitasnya.

Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya penelitian dengan informasi terkhususnya berkaitan dengan Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia sebagai instrumen diplomasi bagi Indonesia ke *Southern Partners*. Salah satu penelitian yang membahas peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Andirini Pujayanti (2015) dengan judul Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia dari Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dianggap relevan dengan tujuan dari penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang KSS dan manfaatnya bagi Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam menunjang dan menguatkan kerja sama pembangunan, khususnya di antara negara berkembang. Kerja sama ini menjadi kerangka penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan. Dengan prestasi pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia memiliki kontribusi yang kuat dalam upaya perbaikan arsitektur bantuan pembangunan internasional. Indonesia terus berupaya menjadi mitra yang andal dan efektif dalam KSS.

Selain penelitian di atas, penelitian yang punya relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Dampak Bantuan Indonesia terhadap Negara Anggota Kerja Sama Selatan-Selatan di Kawasan Asia yang diteliti oleh Ayu Rachmawaty, Ade Rachmaliani, dan Ahmad Rizaldi (2019) dari Universitas UPN “Veteran” Jakarta. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana peneliti mendeskripsikan mulai dari bentuk-bentuk bantuan luar negeri Indonesia terhadap negara mitra KSS, program apa saja yang dijalankan oleh Indonesia, dan dampak dari bantuan luar negeri Indonesia terhadap perkembangan negara-negara mitra KSS.

SIMPULAN

Sebagai kebijakan politik luar negeri Indonesia, KSST Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional yaitu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan diplomasi strategis (menyangkut isu-isu tertentu). KSST Indonesia dapat menjadi media Indonesia untuk berhubungan baik dengan negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikan terutama kepada *Southern Partners*.

Kemudian akan berpengaruh pada perluasan kerja sama Indonesia di bidang-bidang lain, membuka akses pasar dan investasi. Selain itu, secara tidak langsung Indonesia turut mempromosikan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pada dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian isu-isu di tingkat global.

Berdasarkan Dyadic Power Theory oleh Norah Dunbar pada tahun 2004, peneliti mengadaptasi teori tersebut untuk menjelaskan bagaimana hubungan diplomasi Indonesia ke Southern Partners. Kemudian keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam bidang-bidang tertentu lewat flagship programs KSST Indonesia yang dimiliki Indonesia sebagai elemen resources, menghasilkan program-program yang akan dijalankan dalam kerangka kerja sama tersebut sebagai usaha control attempts lewat usaha diplomasi yaitu dalam penelitian ini diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan diplomasi bantuan luar negeri.

Dari segi diplomasi, pelaksanaan KSST Indonesia merupakan instrumen untuk menjalankan diplomasi tersebut ke *Southern Partners*. Peneliti memilih tiga macam diplomasi yang dapat dilakukan lewat kerja sama tersebut yaitu diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan diplomasi bantuan luar negeri. Melalui KSST Indonesia, Indonesia telah membuktikan bahwa sebagai negara yang kini masuk dalam kategori *middle income country*, Indonesia bukan saja sebagai negara penerima bantuan (negara recipient) tetapi juga sudah mampu menjadi negara yang memberikan bantuan atau negara provider terkhususnya bagi *Southern Partners*.

Dengan adanya KSST, persoalan-persoalan yang sulit diselesaikan oleh negara berkembang dapat terbantuan tanpa harus mengalami development proximity oleh negara maju. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia merupakan bantuan teknis dan merupakan peningkatan kapasitas (*capacity building*) terutama bagi aktor grassroots sebagai pemangku kepentingan utama yang sifatnya *low politics*.

Meski manfaat yang didapat Indonesia tidak serta merta terlihat gamblang secara langsung, namun KSST Indonesia sebenarnya membentuk posisi Indonesia di mata Southern Partners. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara tidak langsung sebenarnya berposisi lebih ‘dominan’ dan memiliki power lebih di antara negara-negara Southern Partners penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, B. & Prakoso, B. M. (2017). Peran Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. *Jurnal Transborders*, (1)1, 20-33. P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*. Yogyakarta, Indonesia: CALPULIS
- Apresian, S. R. (2016). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional by Universitas Katolik Parahyangan*, 12(2), 189-203. p-ISSN: 2614-2562, e-ISSN: 2406-8748.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta
- Bayne, N. & Woolcock, S. (2017). *The New Economic Diplomacy* (4th ed.). London, United Kingdom: Routledge
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy Theory and Practice* (4th ed.). Hampshire, United Kingdom: Palgrave Macmillan
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2014). Studi mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular & Japan International Cooperation Agency (JICA), CSIS.
- Chandra, P. (1995) *International Politics* (3rd ed.). New Delhi, India: Vikash Publishing House PVT.
- Columbis, Theodore A. & Wolfe, James A. (1986). *Introduction to International Relations: Power and Justice*. London, United Kingdom: Prentice Hall
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Dunbar, N. E. (2011). Theory in Progress: Dyadic Power Theory: Constructing a Communication-Based Theory of Relational Power. *Journal of Family Communication*, 4:3-4, 235-248. DOI: 10.1080/15267431.2004.9670133

- Holsti, K. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233-309. DOI:10.2307/3013584
- Japan International Cooperation Agency. (2010). *Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan. Aid for Development Effectiveness Secretariat, Japan International Cooperation Agency.*
- Jeffrey A. Frieden & David A. Lake (2003). *International Political Economy: Perspective on Global Power and Wealth* (4th ed.). London, England: Taylor & Francais e-Library.
- KAA: Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular diresmikan (Kementerian Komunikasi dan Informatika). (20 April 2015). Diperoleh dari website Kementerian Komunikasi dan Informatika:
- Kementerian Keuangan (2011). *Kajian Membangun Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia Secara Berkelanjutan*. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional, Kementerian Keuangan.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (n.d.). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2020: Prioritas Diplomasi 4+1 #Diplomacy4PeaceandProsperity. Diperoleh dari website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: [y](#)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2011). *Diplomasi Indonesia 2010*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Luar Negeri RI
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Kajian Mandiri Reorientasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Kementerian Luar Negeri RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Bappenas). (2015). Kajian Integrasi Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dengan RPJMN 2015-2019. Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Sekretariat Negara (2017). *Pembentukan "Single Agency" Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia*. Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2017). *Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia*. Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara.
- Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago, USA: University of Chicago
- Miles, M.B. & Huberman, A. M.(1994). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). California, United States: SAGE Publications.
- Phlipot, C. (2010). *Strategic Studies Institute Book: VOLUME I: THEORY OF WAR AND STRATEGY* (Bartholomees J., 5th ed.). USA: Army War College.
- Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia. *Politica*, 6(1), 63-86. ISSN: 2087-7900.
- Rachmawati, I. (2016). *Diplomasi Publik: Meretas Jalan bagi Harmoni dalam Hubungan Antarnegara*. Yogyakarta, Indonesia: CALPULIS.
- Rachmawaty, A., Rachmaliani, A., & Rizaldi, A. (2019). Dampak Bantuan Indonesia Terhadap Negara Anggota Kerja Sama Selatan-Selatan di Kawasan Asia. *Jurnal Hubungan Internasional Mandala*, 2(1), 80-95. P-ISSN: 2599-0683, E-ISSN: 2599-0675.
- Sabaruddin, S. (2016). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. 12(1). DOI: 10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90.
- Saifuddin, A. F. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21, Sebuah refrensi Panduan Tematis* (J. T. Ishiyama & M. Breunning, Trans.) Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, D. S. (2009). *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema* (J. Steans & L.